



**LEBONG**

**SELASA, 29 MARET 2022**

**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	<input type="checkbox"/>	MEDIA INDONESIA
<input type="checkbox"/>	BENGKULU EKSPRESS	<input type="checkbox"/>	KOMPAS
<input type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU	<input type="checkbox"/>	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Seluruh OPD Harus Tanggung Jawab**

**Temuan BPK  
14 Tahun**

**TUBEI** - Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong, Jauhari Candra, SP, MM mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemerintah Kabupaten (Pekab) Lebong segera menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kalaupun belum bisa menyelesaikan temuan kelebihan bayar, paling tidak OPD menguyur penyelesaian temuan pelanggaran administrasi atas penggunaan anggaran selama 14 tahun.

Yakni anggaran sejak tahun 2006 hingga 2020 sebagaimana yang belum lama ini disampaikan BPK Perwakilan Bengkulu kepada Pekab Lebong. "Walau pun kegiatan itu bukan di masa kepemimpinan bupati sekarang, namun Pekab

Lebong tetap harus menyelesaikannya," kata Jauhari.

Sesuai surat yang disampaikan BPK, Pekab Lebong diminta menyelesaikan semua temuan itu, dalam tahun ini. Jika tidak terkejar hingga batas waktu yang diberikan, Jauhari pastikan pihaknya akan koordinasi ke BPK guna penyelesaian melalui sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (MPTP-TGR). "Untuk tim MPTP-TGR sudah dibentuk, bahkan bupati sudah menandatangani SK nya (surat keputusan, red)," terang Jauhari.

Dibentuknya tim MPTP-TGR bertujuan sebagai dasar hukum bagi Pekab Lebong dalam menentukan sikap terkait temuan itu. Bahkan dalam teknisnya tidak menutup kemungkinan OPD yang masuk dalam daftar catatan BPK akan dipanggil satu persatu.

"Yang pasti tim MPTP-TGR akan memantau langsung sejauh mana penyelesaian temuan BPK oleh OPD," ungkap Jauhari.

Sementara Bupati Lebong, Kopli Ansori memastikan seluruh temuan BPK akan diselesaikan. Baik yang hanya sebatas pelanggaran administrasi maupun masalah keuangan, tidak boleh ada yang meninggalkan satupun masalah tanpa penyelesaian. "Kalau OPD bersangkutan tidak serius menindaklanjuti temuan BPK, jangan salahkan Pekab Lebong jika penyelesaiannya dilimpahkan ke penegak hukum," tegas Kopli.

Diketahui, BPK menemukan 314 kegiatan yang melanggar administrasi dan keuangan. Dari kegiatan itu, BPK menerbitkan 726 rekomendasi penyelesaian. Namun baru 428 rekomendasi yang ditindaklanjuti Pekab Lebong. (sca)